Gereja, Ruang Publik dan Rasa Aman

Oleh : Gatut Priyowidodo,Ph.D

Tentu mengejutkan. Tidak ada petir, angin kencang atau hujan, tiba-tiba umat Katolik yang lagi misa, panik, berlarian, keluar dari gereja. Menyelamatkan diri. Karena apa? Di altar, dekat mimbar kotbah tas ransel seorang remaja AH (18) memercikan api pertanda ada bom yang segera meledak. Karena tak kunjung terjadi ledakan remaja belasan tahun terebut menyerang Pastur Albert S. Panidingan. Itulah kisah percobaan bom bunuh diri di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep di Jalan Dr Mansur Medan, Minggu (28/8/2016) pagi.

Gereja termasuk tempat ibadah agama-agama lain, adalah area publik yang anti diskriminasi. Artinya, siapapun orangnya berdosa atau tidak, penjahat atau ulama, kaya atau miskin memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke tempat ibadah. Bahwa tujuannya hendak bertobat atau memanipulasi tindak jahat hanya dia dan Tuhan yang tahu.

Lantaran prosedur yang fleksibel, longgar, tidak kaku dan kerap *kurang terdeteksi dari monitoring aparat keamanan, rumah ibadah menjadi arena yang rentan perilaku provokatif yang berujung ketegangan* horizontal yang terencana. Pergeseran orientasi ini semakin memperteguh keyakinan, bahwa tempat-tempat yang semestinya menjadi simbol kontemplasi relasi manusia dan sang Penciptanya kian terkoyak, dan menjadi wilayah yang harus diwaspadai.

Ruang Publik versus Fasilitas Publik

Ruang publik tidak identik dengan fasilitas publik. Ruang publik tidak ada sekat pembatas. Bahkan dalam arena yang terbatas sekalipun bisa menjadi wilayah diskursus publik yang sangat bebas. Konsep ruang publik merupakan bagian vital dalam negara demokratis. Demokrasi dapat berjalan dengan baik jika dalam suatu negara terdapat ruang publik yang egaliter dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menyampaikan idenya (Littlejohn, 2009). Ruang publik menjadi arena pergulatan membangun pola pikir yang kritis, cerdas dan produktif. Ia menjadi media persemaian perbedaan argumentasi untuk tumbuh dan berkembang tanpa unsur ketakutan. Karena itu area ini semestinya semakin diperbanyak dan tidak harus dijauhi.

Toulouse (1998) mengungkapkan terdapat tiga prinsip utama dalam ruang publik yaitu: 1. Akses yang mudah terhadap informasi. Teknologi masa kini memungkinkan anggota masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. 2. Tidak ada perlakuan istimewa terhadap partisipan. Tidak ada kelompok yang lebih dominan atas kelompok lainnya. 3. Peserta/partisipan mengemukakan alasan rasional dalam berdiskusi mencari konsensus. Alasan rasional menjadi syarat penting terwujudnya ruang publik yang baik.

Fasilitas publik lain lagi. Ini adalah area yang sejatinya mirip ruang publik, namun tersekat lokasi, ruang dan waktu. Direncanakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tetapi dengan kekhususan-kekhususan tertentu. Bila demikian apa yang menyamakan keduanya? Keduanya sangat memerlukan lingkungan yang aman. Aman menjadi factor penentu aktivitas tersebut diselenggarakan baik di ruang publik atau ketika memanfaatkan fasilitas publik.

Baik saya sekedar buat perbandingan. Di Bukit Bintang, Kuala Lumpur orang dengan sangat leluasa memanfaatkan fasilitas publik jalan, trotoar atau taman kota tanpa rasa kuatir dibatasi jam malam dan ketakutan. Di Glodok atau sekitar Monas Jakarta, orang akan berpikir sekian kali ketika harus jalan sendiri menikmati fasilitas yang sudah tertata apik, rapi dan indah. Terlebih bila yang jalan-jalan itu turis perempuan. Memang di Jakarta tidak sedramatis di New Delhi, dimana wisatawan perempuan wajib ada pendampingnya bila tidak ingin terkena kasus perkosaaan. Tetapi yang menyamakan, bahwa ketakutan itu masih terpelihara sekalipun situasi di Jakarta barangkali sudah sangat berubah.

Sama halnya dengan ruang publik, fasilitas publik sejatinya juga dibangun sebagai arena perjumpaan keragaman budaya, etnik, asal-usul, status sosial dan mungkin juga pluralitas agama agar saling menyapa. Sisi yang ditonjolkan bukan kuatnya perbedaan tetapi hangatnya persahabatan bahwa sesungguhnya manusia itu saling melengkapi satu sama lain.

Kesamaan lain yang bisa diperhatikan adalah inisiatif individu. Keduanya sesungguhnya juga memerlukan individu yang tangguh ketika berada di tengah-tengah ruang publik ataupun fasilitas publik. Jangan salah, individu sebetulnya actor penentu kebermanfaatan ruang publik ataupun fasilitas publik.

Ketika ruang publik mentfasilitasi terjadinya diskursus tematik tentang ekonomi, politik, sosial budaya, spiritualitas atau tenta yang lainnya, maka kualitas dan produktifitasnya terbangun dari interaksi yang terjalin diantara individu yang merdeka dalam pertukaran ide, pesan dan gagasan tanpa rasa tertekan. Mediumnya bisa media konvensional, *new media*, percakapan langsung atau apapun yang memungkinkan lalu-lintas pemikiran-pemikiran tersebut terfasilitasi secara baik.

Demikian halnya, ketika fasilitas publik disediakan negara ataupun atas inisiatif masyarakat sendiri, dinamikanya juga terbentuk karena interaksi para invidu yang terlibat. Ruang, waktu dan tempat hanya akan menjadi lorong tak bertuan, bila kesenyapan dan ketidakpedulian terhadap sekitar dipelihara sebagai sebuah kebenaran. Menyapa, menegur atau mentolil percakapan itu butuh keberanian. Bila itu tidak dimaksimalkan, tentu apa gunanya kita mengklaim sebagai makluk sosial. Jangan-jangan sesungguhnya kita sendiri yang a-sosial.

Aman itu Kebutuhan bukan Pilihan

Hirarkhi kebutuhan aman menurut Abraham Maslow menduduki peringkat kedua. Peringkat pertama adalah pemenuhan kebutuhan fisiologis. Umumnya kebutuhan fisiologis bersifat neostatik (usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik) seperti makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan seks. Kebutuhan fisiologis ini sangat kuat, dalam keadaan absolut (kelaparan dan kehausan) semua kebutuhan lain diringgalkan. Orang hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan primer ini.

Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, manusia pada dasarnya melengkapi dengan pemenuhan kebutuhan rasa aman. Level berikutnya, kebutuhan cinta, harga diri dan aktualisasi diri. Bagi kebanyakan masyarakat, sejatinya kebutuhan rasa aman termasuk kebutuhan dasar. Karena terkait dengan pertahanan hidup. Orang atau kelompok masyarakat tidak mungkin bisa melunggungkan kehidupan, jika serba dalam ketidakpastian. Apa yang terjadi di kawasan konflik mempertegas bahwa *survival* atau kelangsungan hidup menjadi barang mahal dan itu adalah kebutuhan dasar.

Mungkin makan, minum terpenuhi tetapi kalau kepastian memperolehnya di esok hari adalah sebuah kecemasan dan penuh ketidakpastian, maka jangan heran bila rasa aman harus diadirkan oleh institusi lebih besar yang disebut negara. Negara tidak boleh tinggal diam bila sebuah kekacauan sengaja diciptakan guna menghardik ketenangan publik. Pembiaran negara terhadap terjaminya rasa aman tidak saja meroduksi kehadiran negara secara fungsional tetapi pada tataran praksis menyuburkan antipati publik. Konsekuensinya apa? Bertahap negara sedang merancang departisipasi rakyat yang semakin kuat yang pada gilirannya justru merongrong kewibawaan negara itu sendiri.

Kewibawaan negara inilah yang pernah dicemaskan oleh Presiden Soekarno, tujuh tahun setelah Indonesia merdeka. Bahwa selain empat krisis yang dihadapi Indonesia pada saat itu yakni krisis politik, krisis fungsi kelembagaan negara, krisis cara berpikir dan krisis moral, yang harus dihadapi adalah krisis kewibawaan. Tidak bisa dibayangkan, jika sebuah negara dikelola tanpa wibawa, bukan saja kepada rakyat domestik negara atau pemerintah menjadi bulan-bulanan tetapi ketika berhadapan dengan negara lain suasana batin yang diliputi rasa rendah diri juga amat menekan.

Negara kuat atau negara lemah sebetulnya tidak semata-mata, pihak eksternal yang menentukan. Tetapi justru yang harus dicermati adalah pembusukan dari dalam. Kekurang solidan dalam menciptakan ruang publik yang aman atau kondusif sudah mengindikasikan bahwa secara sengaja ada elemen bangsa ini yang tidak ingin negaranya maju dan disegani. Ini adalah tantangan terberat.

Konstitusi memang menjamin bahwa siapapun warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tetapi hak dan kewajiban itu bukan *taken for granted*. Harus ada perjuangan yang optimal dan maksimal. Jangan sampai tuntutan hak jauh lebih tinggi dibanding upaya pemenuhan kewajiban-kewajiban selaku warga negara.

Gereja Medium Ruang Publik

Jika dikritisi gereja adalah tempat untuk diskusi-diskusi dalam pilihan lain terhadap tema-tema kontemporer seputar kehidupan berjemaat, bergereja, teknologi, genderisme, bioteknologi, bermedia, berbio-tek, berpendidikan dan bernegara juga masih sangat luas untuk menjadi topik yang relevan dan aktual diperbincangkan.

Tema dan teologis sebagai dan penting karena umat semakin hari juga semakin rasional dan melek teknologi informasi. Apapun informasi bisa diakses dalam kecepatan superspat dan tersimpan dalam gadang dan tanpa batas. PGI beberapa bulan lalu saja sudah berani memancing isu sesensitif terkait LGBT. Proksi bermunculan. Ada yang senang, karena situasi di lapangan itulah yang terjadi. Yang kontra menentang dengan pelbagai anti pendapat.

Saya sendiri berpandangan, justru semakin banyak isu-isu kontemporer dilontarkan ke publik dalam hal ini jemaat gereja-gereja anggota PGI akan memperluas perspektif. Memang ada yang mengelitik, apakah pemahaman semua anggota gereja sudah siap dan sama? Tentu belum. Tetapi tidak berarti bermaksud isu-isu tersebut yang menyebabkan penyekatan bermadzat gereja tinggal diam terhadap nilai tidak mengerti perubahan. Ini juga sikap yang serba salah tidak menampilkan suara profetis diantara informasi yang amat deras seperti sekarang ini.

Gereja harus menyadari bahwa umat memiliki kerinduan berbeda-beda kepribadian, orientasi seks, orientasi pelayanan dan segala ragam perbedaan yang ada. Lalu ketika ada bahwa itu diterima ada di gereja, lalu gereja tidak mendiskriminasi dan memberikan surat penggembalaan, lalu umat yang dalam pemimpinan ini bertanya kepada siapa? Elit-elit mestinya gembala sidang untuk memperoleh pencerahan, tetapi kalau kemudian bertanya dan mencari jawab di luar umat Kristiani, siapa yang disalahkan. Pilihannya, suka atau tidak gereja harus memfasilitasi dan menjembatani sebagai medium ruang publik yang produktif dan memberi pencerahan umat. Tidak justru cuci tangan ala Pilatus karena bencinya Tetapi yang dipikul sebagai bentuk tanggungjawab iman.(*)

*Gatut Priyowidodo, Ph.D Ketua Pusat Kajian Komunikasi Petra (PKKP) dan Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi UK Petra Surabaya

Scanned by CamScanner